BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 181 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis BKPSDM yang selanjutnya disebut Renstra BKPSDM adalah dokumen perencanaan BKPSDM untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja BKPSDM yang selanjutnya disebut Renja BKPSDM adalah dokumen perencanaan BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM yang selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan pada BKPSDM, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

Pasal 2

Renja BKPSDM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada rancangan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029.

Pasal 3

(1) Renja BKPSDM Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 yang akan digunakan BKPSDM untuk melaksanakan rencana kerja BKPSDM;
(2) Renja BKPSDM Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja BKPSDM tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan BKPSDM;
    b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara Renja BKPSDM dengan dokumen RKPD dan Renstra BKPSDM;
    c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran BKPSDM yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
    d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Renja BKPSDM digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja BKPSDM selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029.

BAB II
DOKUMEN RENJA BKPSDM

Pasal 5

(1) Isi dan uraian dokumen Renja BKPSDM Tahun 2026 disusun dengan sistemika:
   a. bab I latar belakang dan dasar hukum;
   b. bab II hasil evaluasi Renja BKPSDM tahun lalu;
   c. bab III tujuan dan sasaran;
   d. bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
   e. bab V penutup; dan
   f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Isi dan uraian dokumen Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA BKPSDM

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja BKPSDM menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja BKPSDM meliputi:

a. semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab BKPSDM sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUAPPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara BKPSDM dengan DPRD; dan

d. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja BKPSDM.

Pasal 7

(1) BKPSDM membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja BKPSDM.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan realisasi kinerja dan anggaran Renja BKPSDM disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/atau perubahan Renja BKPSDM tahun berjalan.
(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik.
(6) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Kepala BKPSDM melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM dan evaluasi hasil Renja BKPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan BKPSDM terhadap pelaksanaan dan hasil Renja BKPSDM.

(3) Kepala BKPSDM menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja BKPSDM.

(4) Pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA BKPSDM

Pasal 9

(1) Renja BKPSDM dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat ketidaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 8; dan
   c. terdapat adanya penyesuaian tujuan dan sasaran BKPSDM beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029.

(2) Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja BKPSDM tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 181

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 181 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang diserta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Bandung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran SKPD.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
n. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146); dan
o. Peraturan Bupati Bandung tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 36).

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung pada tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Renja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Menjadi acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;
- Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
2.4 *Review* terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat pelaksanaan 3 (Tiga) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 50.014.486.578,- (Lima Puluh Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar Rp. 41.415.463.468,- (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 82,81%.

II.1.1 Capaian Keberhasilan Program

Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata persentase capaian program 105.67%. Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.

Tabel 2. 1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
KEPEGAWAIAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kategori Nilai AKIP Perangkat Daerah	79	Poin	Rp26.911.721.418,00	84,65	Poin	Rp22.522.335.513,00	107,15%	83,69%
	Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	93	Persen		97,18	Persen		104,49%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100	Persen	Rp20.908.700,00	100,00%	Persen	Rp20.834.200,00	100,00%	99,64%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp4.908.700,00	4	Dokumen	Rp4.908.700,00	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp2.000.000,00	2	Dokumen	Rp1.995.700,00	100,00%	99,79%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	Rp2.000.000,00	2	Dokumen	Rp1.994.000,00	100,00%	99,70%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp3.000.000,00	2	Dokumen	Rp2.981.800,00	100,00%	99,39%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	Rp3.000.000,00	2	Dokumen	Rp2.982.000,00	100,00%	99,40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp2.000.000,00	1	Laporan	Rp1.995.200,00	100,00%	99,76%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	Rp4.000.000,00	7	Laporan	Rp3.976.800,00	100,00%	99,42%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100	Persen	Rp24.957.556.264,00	97,44%	Persen	Rp20.984.382.568,00	97,44%	84,08%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan	Rp27.435.109.464,00	60	Orang/bulan	Rp20.961.944.768,00	92,31%	76,41%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp9.136.000,00	1	Laporan	Rp9.129.200,00	100,00%	99,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	Rp13.310.800,00	8	Laporan	Rp13.308.600,00	100,00%	99,98%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	0	Persen	Rp0,00	0,00%	Persen	Rp0,00	0,00%	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	Rp0,00	0	Orang	Rp0,00	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	Rp0,00	0	Orang	Rp0,00	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	Persen	Rp475.858.554,00	113,76%	Persen	Rp424.668.736,00	113,76%	89,24%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp15.000.000,00	1	Paket	Rp14.705.100,00	100,00%	98,03%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	Rp73.200.000,00	2	Paket	Rp72.083.200,00	100,00%	98,47%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp43.000.000,00	1	Paket	Rp42.505.900,00	100,00%	98,85%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp103.658.554,00	1	Paket	Rp96.731.912,00	100,00%	93,32%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	Rp11.000.000,00	3	Dokumen	Rp10.120.000,00	100,00%	92,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Rp15.000.000,00	12	Laporan	Rp14.980.000,00	100,00%	99,87%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164	Laporan	Rp215.000.000,00	322	Laporan	Rp173.542.624,00	196,34%	80,72%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	Persen	Rp43.078.300,00	120,00%	Persen	Rp38.841.000,00	120,00%	90,16%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	Rp43.078.300,00	6	Unit	Rp38.841.000,00	120,00%	90,16%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	Persen	Rp966.350.600,00	100,26%	Persen	Rp821.937.354,00	100,26%	85,06%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000	Laporan	Rp12.000.000,00	9070	Laporan	Rp9.750.000,00	100,78%	81,25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp100.000.000,00	12	Laporan	Rp38.978.074,00	100,00%	38,98%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	Rp0,00	0	Laporan	Rp0,00	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp854.350.600,00	12	Laporan	Rp773.209.280,00	100,00%	90,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	93%	Persen	Rp447.969.000,00	97,18%	Persen	Rp231.671.655,00	104,49%	51,72%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	Rp0,00	0	Unit	Rp0,00	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	Rp202.969.000,00	21	Unit	Rp187.428.655,00	100,00%	92,34%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	Unit	Rp40.000.000,00	27	Unit	Rp39.293.000,00	100,00%	98,23%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp200.000.000,00	0	Unit	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp5.000.000,00	1	Unit	Rp4.950.000,00	100,00%	99,00%
Penataan Organisasi	Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian	0	Persen	Rp0,00	0,00%	Persen	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0	Dokumen	Rp0,00	0	Dokumen	Rp0,00	0,00%	0,00%
JUMLAH 1				Rp26.911.721.418,00			Rp22.522.335.513,00	107,15%	83,69%
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata persentase manajemen layanan ASN	87	Persen	Rp11.554.148.660,00	127,26%	Persen	Rp7.499.019.895,00	127,26%	64,90%
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	Rp9.039.886.946,00	100,01%	Persen	Rp5.282.179.203,00	100,01%	58,43%
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp28.211.454,00	1	Dokumen	Rp27.445.500,00	100,00%	97,28%
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	Rp48.750.000,00	1	Dokumen	Rp38.060.500,00	100,00%	78,07%
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	Rp8.318.034.000,00	2	Dokumen	Rp4.682.245.320,00	100,00%	56,29%
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	Rp15.000.000,00	1	Laporan	Rp9.088.500,00	100,00%	60,59%
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200	Dokumen	Rp94.840.000,00	1073	Dokumen	Rp71.800.000,00	89,42%	75,71%
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	Rp60.000.000,00	1	Dokumen	Rp44.865.900,00	100,00%	74,78%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	Rp200.000.000,00	2	Lembaga	Rp153.830.200,00	100,00%	76,92%
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp239.051.492,00	1	Dokumen	Rp223.161.283,00	100,00%	93,35%
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	Dokumen	Rp18.000.000,00	5533	Dokumen	Rp18.000.000,00	110,66%	100,00%
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	Rp18.000.000,00	1	Laporan	Rp13.682.000,00	100,00%	76,01%
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90	Persen	Rp942.500.000,00	198,13%	Persen	Rp794.057.120,00	198,13%	84,25%
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40	Dokumen	Rp152.500.000,00	128	Dokumen	Rp128.482.000,00	320,00%	84,25%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750	Dokumen	Rp210.000.000,00	2177	Dokumen	Rp198.437.120,00	124,40%	94,49%
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	Rp580.000.000,00	3	Dokumen	Rp467.138.000,00	150,00%	80,54%
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	100	Persen	Rp1.134.641.000,00	113,40%	Persen	Rp1.041.885.072,00	113,40%	91,83%
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	251	Dokumen	Rp493.241.000,00	173	Dokumen	Rp465.624.222,00	68,92%	94,40%
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300	Orang	Rp470.970.000,00	344	Orang	Rp429.158.000,00	114,67%	91,12%
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	Dokumen	Rp0,00	0	Dokumen	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40	Orang	Rp100.000.000,00	40	Orang	Rp80.152.000,00	100,00%	80,15%
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40	Orang	Rp70.430.000,00	68	Orang	Rp66.950.850,00	170,00%	95,06%
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95	Persen	Rp437.120.714,00	97,50%	Persen	Rp380.898.500,00	97,50%	87,14%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	Rp61.730.000,00	1	Dokumen	Rp45.773.000,00	100,00%	74,15%
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen	Rp178.500.000,00	2	Dokumen	Rp154.084.700,00	100,00%	86,32%
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	Laporan	Rp0,00	0	Laporan	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0	Orang	Rp0,00	0	Orang	Rp0,00	0,00%	0,00%
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326	Orang	Rp8.776.000,00	326	Orang	Rp8.140.000,00	100,00%	92,75%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40	Orang	Rp40.000.000,00	13	Orang	Rp37.378.000,00	32,50%	93,45%
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	Rp101.149.500,00	20	Laporan	Rp90.106.400,00	100,00%	89,08%
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	Dokumen	Rp31.965.214,00	60	Dokumen	Rp31.949.600,00	150,00%	99,95%
Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	Rp15.000.000,00	1	Laporan	Rp13.466.800,00	100,00%	89,78%
JUMLAH 2				Rp11.554.148.660,00			Rp7.499.019.895,00	127,26%	64,90%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	79%	Persen	Rp11.548.616.500,00	82,59%	Persen	Rp11.394.108.060,00	82,59%	98,66%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis	3%	Persen	Rp950.460.000,00	2,87%	Persen	Rp904.666.500,00	95,54%	95,18%
Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	Rp135.000.000,00	1	Dokumen	Rp113.738.500,00	100,00%	84,25%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1870	Orang	Rp780.460.000,00	1620	Orang	Rp760.050.000,00	86,63%	97,38%
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	Rp35.000.000,00	1	Dokumen	Rp30.878.000,00	100,00%	88,22%
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3%	Persen	Rp10.598.156.500,00	4,15%	Persen	Rp10.489.441.560,00	138,25%	98,97%
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	Rp98.040.000,00	1	Dokumen	Rp97.109.000,00	100,00%	99,05%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			% Kinerja	% Keuangan
		K		RP	K		RP		
dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional									
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2108	Laporan	Rp10.470.116.500,00	4527	Laporan	Rp10.364.694.360,00	214,75%	98,99%
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	Rp30.000.000,00	1	Dokumen	Rp27.638.200,00	100,00%	92,13%
JUMLAH 3				Rp11.548.616.500,00			Rp11.394.108.060,00	82,59%	98,66%
JUMLAH TOTAL				Rp50.014.486.578,00			Rp41.415.463.468,00	105,67%	82,81%

Walaupun secara umum capaian rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dinyatakan berhasil namun masih ada kegiatan yang capaian kinerjanya masih di bawah target. Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a) Adanya Perubahan Parsial yang menghambat terhadap proses pencairan;
   b) Masih adanya kekurangan pahaman pengelola keuangan dalam pengoperasian SIPD.
2. PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
   a) Seleksi pengadaan ASN masih menunggu peraturan dan jadwal dari Pusat;
   b) Adanya peraturan yang berubah sehingga perlu kehati-hatian dalam melaksakan kegiatan;
   c) Adanya runtutan kegiatan yang tergantung dengan sistem periodesasi dan penjadwalan dari Instansi Vertikal; dan
   d) Masih adanya pegawai dilingkungan Pemkab Bandung yang kurang memahami dalam menggunakan Aplikasi Kepegawaian.
3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
   a) Adanya penyesuaian jadwal pengiriman diklat dengan jadwal dari Lembaga Penyelenggara Diklat; dan
   b) Jadwal Pendidikan dan Pelatihan yang dikeluarkan oleh penyelenggaran kurang sesuai dengan Anggaran Kas.

II.1.2 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka beeluang untuk menetapkan target kinerja

yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

II.1.3 Kebijakan/Tindakan yang Perlu Diambil

Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM Sampai dengan 2024 diuraikan dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM (TC.29.)

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025		
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
						Nilai AKIP BKPSDM	80,50	Point	81,25	Point	79	Point	84,65	Point	107,15%	82,00	Point	84,70	Point	103%
						Persentase Aset Dalam Konisi Baik	95%		92%		93%		97,18%		104,49%	94%		81%		81%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		83%		83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	20	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42	Laporan	21	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	35	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				100%		97,44%		97,44%	100%		82%		82%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	325	Orang	130	Orang	65	Orang	60	Orang	92,31%	63	Orang	253	Orang	78%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	5	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	Laporan	24	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	40	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%				0%		0%		0%	100%		69%		69%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	10	Pengadaan Pakaian Dinas	2	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	1	Paket	1	Paket	50%

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025		
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	485	Orang	264	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	70	Orang	334	Orang	69%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	44	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0	Orang	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				100%		114%		113,76%	100%		112%		112%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	Paket	3	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	5	Paket	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	9	Paket	75%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	Paket	3	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Paket	3	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	5	Paket	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	Dokumen	9	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	15	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	Laporan	911	Laporan	164	Laporan	322	Laporan	196%	75	Laporan	1308	Laporan	291%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				100%		120%		120%	100%		61%		61%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0%	0	Unit	1	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0 Unit	0	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0%	0	Unit	0	0 Unit	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,07	3	Pengadaan Mebel	0	0 Unit	0	Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0%	0	Unit	0	0 Unit	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,07	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150	Unit	23	Unit	5	Unit	6	Unit	120%	4	Unit	33	Unit	22%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%		100%		100,3%	100%		65%		65%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.000	Laporan	27531	Laporan	9.000	Laporan	9.070	Laporan	101%	9.000	Laporan	45.601	Laporan	84%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	91%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	0	Laporan	0%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	60	Laporan	83%

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025		
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%				93%		97,18%		104,49%	94%		74%		74%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0%	0	unit	1	Unit	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142	Unit	73	Unit	23	Unit	21	Unit	91%	23	Unit	117	Unit	82%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162	Unit	81	Unit	27	Unit	27	Unit	100%	27	Unit	135	Unit	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0%	1	Unit	1	Unit	17%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17	Unit	13	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	15	Unit	88%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,13	0	Penataan Organisasi	100%				0%		0%		0%	0%		100%		100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	2	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100%				87%		127%		127,26%	90%		136%		136%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%				100%		100,01%		100,01%	100%		84%		84%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	12	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	10	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	5	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7.200	Dokumen	3.908	Dokumen	1.200	Dokumen	1.073	Dokumen	89%	1.200	Dokumen	6.181	Dokumen	86%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	12	Lembaga	6	Lembaga	2	Lembaga	2	Lembaga	100%	2	Lembaga	10	Lembaga	83%

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025		
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	30.000	Dokumen	15.347	Dokumen	5.000	Dokumen	5.533	Dokumen	111%	5.000	Dokumen	25.880	Dokumen	86%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	5	Laporan	83%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	0	Mutasi dan Promosi ASN	90%				90%		198%		198%	90%		101%		101%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	240	Dokumen	124	Dokumen	40	Dokumen	128	Dokumen	320%	40	Dokumen	292	Dokumen	122%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10.500	Dokumen	5.425	Dokumen	1.750	Dokumen	2.177	Dokumen	124%	1.750	Dokumen	9.352	Dokumen	89%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	3	Pengelolaan Promosi ASN	12	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150%	2	Dokumen	11	Dokumen	92%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	100%				100%		113%		113,40%	100%		249%		249%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	2	Pengelolaan Assessment Center	600	Dokumen	2517	Dokumen	251	Dokumen	173	Dokumen	69%	100	Dokumen	2.790	Dokumen	465%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.000	Orang	1451	Orang	300	Orang	344	Orang	115%	300	Orang	2.095	Orang	105%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0%	0	Dokumen	1	Dokumen	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	240	Orang	894	Orang	40	Orang	40	Orang	100%	40	Orang	974	Orang	406%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	240	Orang	303	Orang	40	Orang	68	Orang	170%	40	Orang	411	Orang	171%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%				95%		98%		97,50%	95%		112%		112%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	Dokumen	400%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	80%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	1	Laporan	100%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	36	Orang	6	Orang	6	Orang	0	Orang	0%	6	Orang	12	Orang	33%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	1.956	Orang	1098	Orang	326	Orang	326	Orang	100%	326	Orang	1750	Orang	89%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	240	Orang	130	Orang	40	Orang	13	Orang	33%	40	Orang	183	Orang	76%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	120	Laporan	32	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100%	20	Laporan	72	Laporan	60%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	240	Lapiran	102	Laporan	40	Laporan	60	Laporan	150%	40	Dokumen	202	Dokumen	84%
5	3	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	6	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	5	Laporan	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	0	0	0	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			0											

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025		
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	85,08%				79%		82,59%		82,59%	82,08%		270,76%		271%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	18%				3%		2,87%		95,54%	3%		6%		215%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	553	Orang	923	Orang	1870	Orang	1620	Orang	87%	100	Orang	2643	Orang	478%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	18%				3%		4,15%		138,25%	3%		9%		301%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%

Kode Rekening						Uraian	Target Capaian Kinerja Renstra BKPSDM 2021 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024					Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BKPSDM Tahun 2025		
											Target		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target		Realisasi		Tingkat Capaian (%)
1						2	4		5		6		7	8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11
						dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional														
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	2	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	200	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0%	100	Orang	100	Dokumen	50%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	889	0rang	4157	0rang	2108	0rang	4.527	0rang	215%	100	0rang	8.784	0rang	988%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	5	Dokumen	83%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0,09%				0,09%		0,00%		0	0,09%		0,045%		50%
5	4	5.03.5.04.0.00.29.00	2	2,03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	30	Orang	0	Orang	15	Orang	0	Orang	0%	15	Orang	15	Dokumen	50%

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
  lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi BKPSDM 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Analisa Capaian Kinerja BKPSDM Sampai Tahun 2024 (T-C.30.)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra Pada Tahun Ke-						Realisasi Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Rasio				Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BKPSDM	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik	Nilai AKIP BKPSDM	Poin	76,5	77	78	79	82	82.25	78,6	81,25	81,70	84,65	102,75%	105,52%	104,74%	107,15%	82	
		Prosentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	90	91	92	93	94	95	85	90,53	96,96	97,18	94,44%	99,48%	105,39%	104,49%	94	
Terwujudnya sumber daya aparatur yang Profesional, kompeten dan berkinerja	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Nilai Index Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	Poin	67,1	71	73,08	76,08	79,08	82,08	71	71,06	73,81	76,76	105,81%	100,08%	101,00%	100,89%	79.6	

II.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung adalah memproses administrasi kepegawaian di daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, adalah:

1 Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2 Masih perlunya mensosialisasikannya PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN dan peraturan-peraturan mengenai kepegawaian lainnya;
3 Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan
4 Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama di kewilayahan yang disebabkan belum selesainya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan yang merupakan kewenangan PD lain
5 Adanya PNS yang terlibat masalah hukum
6 Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa SKPD
7 Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu
8 Belum akuratnya seluruh data pegawai
9 Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *road map* reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:

a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *minus growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS)
b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
c. Penyelenggaraan *Assesment* yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan:
   - dokumen standar kompetensi manajerial
   - dokumen standar kompetensi bidang
   - metoda/alat ukur peniliaian kompetensi calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
   - kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
   - bussines process MSDM berbasis kompetensi dan peninjauan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

II.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Bandung

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reviu terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta

pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD (T-C.31)

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		- Nilai Sakip Perangkat Daerah	82.25	Point	30.567.158.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		- Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.30	Point	30.366.142.300	
							- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	95	Persen				- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	95	Persen		
5	3	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100	Persen	39.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100	Persen	39.000.000,00	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	4	Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang diselesaikan tepat waktu	4	Dokumen	8.000.000	
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	3.000.000	
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	3.000.000	
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000	
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.000.000	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	10.000.000	
5	3	1	2.02	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1	Dokumen	1.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1	Dokumen	1.000.000	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	3	1	2.02	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Satuan : Data	70	Data	1.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	70	Data	1.000.000	
5	3	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100	Persen	28.480.688.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100	Persen	28.480.688.000	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan	28.445.688.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan	28.445.688.000	
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	20.000.000	
5	3	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	100	Persen	90.380.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	100	Persen	5.000.000	
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	5.000.000	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Orang	85.380.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0	
5	3	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	Persen	461.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100	Persen	361.789.900	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.000.000	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	65.602.500	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	90.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	69.187.400	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	11.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	11.000.000	
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	190.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	166.000.000	
5	3	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	Persen	85.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah	100	Persen	47.761.800	
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	85.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	47.761.800	
5	3	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	Persen	1.136.090.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	Persen	1.297.992.600	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000	Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9000	Laporan	40.000.000	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	34.202.460	
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	0	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	976.090.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.223.790.140	
5	3	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase aset dalam kondisi baik	95	Persen	275.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase aset dalam kondisi baik	95	Persen	133.910.000	
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	220.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	113.950.000	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit	19.960.000	
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	
					Jumlah 1					30.567.158.000	Jumlah 1					30.366.142.300	
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	90	Persen	3.993.756.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN	90	Persen	3.819.350.700	
5	3	2	2.01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	1.498.750.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	Persen	1.426.510.500	
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	35.000.000	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	Dokumen	35.000.000	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	48.750.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen	48.750.000	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	750.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	750.000.000	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	15.000.000	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1	Laporan	15.000.000	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1200	Dokumen	100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	900	Dokumen	100.000.000	
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	60.000.000	Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	Dokumen	42.070.000	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	150.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	150.000.000	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	260.160.000	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5000	Dokumen	15.270.000	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	20.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Laporan	10.260.500	
5	3	2	2.02	0	Mutasi dan Promosi ASN		Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90	Persen	710.000.000	Mutasi dan Promosi ASN		Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi	90	Persen	677.834.200	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40	Dokumen	170.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	40	Dokumen	137.834.200	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750	Dokumen	140.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1750	Dokumen	140.000.000	
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	400.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	400.000.000	
5	3	2	2.03	0	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	100	Persen	1.225.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN	100	Persen	1.225.000.000	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	100	Dokumen	700.000.000	Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	400	Dokumen	700.000.000	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100	Orang	350.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300	Orang	350.000.000	
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	Dokumen	0	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	Dokumen	0	
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	2	Orang	100.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	2	Orang	100.000.000	
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8	Orang	75.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8	Orang	75.000.000	
5	3	2	2.04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95	Persen	560.006.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN Yang Berkinerja Baik	95	Persen	490.006.000	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	61.730.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	61.730.000	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen	103.500.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen	103.500.000	
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	Laporan	0	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	Laporan	0	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6	Orang	211.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3	Orang	141.000.000	
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326	Orang	8.776.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	326	Orang	8.776.000	
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	Orang	40.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	Orang	40.000.000	
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	80.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	Laporan	80.000.000	
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	Dokumen	40.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	Dokumen	40.000.000	
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	15.000.000	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	15.000.000	
5	4	0	0	0	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.294.964.000	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.154.964.000	
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	85	Persen	4.294.964.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	85	Persen	5.154.964.000	
5	4	2	2.01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	3	Persen	820.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi	3	Persen	820.000.000	
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	35.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	35.000.000	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	Orang	750.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	765	Orang	750.000.000	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	35.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	35.000.000	
5	4	2	2.02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3	Persen	3.474.964.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3	Persen	4.334.964.000	
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000	
					Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100	Laporan	3.339.964.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	434	Laporan	4.199.964.000	

KODE					Rancangan						Hasil Analis Kebutuhan / Rancangan Akhir (Berdasarkan Renstra 2025 - 2029)						Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	30.000.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	Dokumen	30.000.000	
5	4	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0,00%	Persen	0			Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0.00%	Persen	0	
5	4	2	2,03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	BKPSDM Kab. Bandung	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0	Orang	0			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	0	Orang	0	
					Jumlah 2					8.288.720.000	Jumlah 2					8.974.314.700	
					Jumlah Total					38.855.878.000	Jumlah Total					39.340.457.000	

II.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Bandung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menata ulang OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPSDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun kepada masyarakat diharapkan agar indikator meningkatnya kepuasan masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menurunnya kasus pengaduan terhadap pelayanan pemerintah dapat dicapai, diwujudkan melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, maupun program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung

Dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Bandung, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan misi ke 4 Bupati Bandung yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai keagamaan”, dimana tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026 adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik’. Setelah dilakukan kajian internal maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah “Meningkatnya kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik”.

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap sasaran dan indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BKPSDM.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik.	Nilai AKIP BKPSDM	77	78	79	82	82.25
			Prosentase BMD dalam Kondisi Baik	91	92	93	94	95
2	Terwujudnya sumber daya aparatur yang Profesional, kompeten dan berkinerja.	Meningkatnya indeks Profesionalisme ASN.	Nilai Index Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	70.08	73.08	76.08	79.08	82.08

Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam peoses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM menjabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi BKPSDM selama kurun waktu 2021 s/d 2026.

Dikarenakan ada Rencana Strategis (Renstra) baru Tahun 2025 s/d 2029, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan pada rencana-rencana yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan Indikator dan program kerja. Renstra baru menjadi dasar untuk menyelaraskan semua kegiatan dengan tujuan dan arah baru sesuai dengan Misi ke-3 Kabupaten Bandung yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025 s/d 2029 yaitu: “Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel”, dimana tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Profesionalitas ASN”. Setelah dilakukan kajian internal maka sasaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bandung adalah “Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN”.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator BKPSDM 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks RB Perangkat Daerah	Point	80,29	80,50	80,80	81,10	81,40	81,70	82	Indeks RB General pada Aplikasi SURABI JABAR
		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Point	63,51	63,60%	63,70%	63,80%	63,90%	64,00%	64,00%	Penilaian Maturitas Risiko BKPSDM oleh APIP Pemkab Bandung
		Indeks Profesionalitas ASN	Point	84,65	84,85	85,05	85,25	85,45	85,65	85,85	Penilaian atas Review Profesionalitas ASN di Instansi Pemerintah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)
	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Point	28,77	28,90	29	29,1	29,2	29,3	29,4	Penilaian atas Review Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi di Instansi Pemerintah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)

III.3. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan didasarkan pada 2 (dua) unsur yaitu unsur Internal dan Eksternal.

Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2026

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Perangkat Daerah
						- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik
5	3	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	3	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata
5	3	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
5	3	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	3	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5	3	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	3	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
5	3	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5	3	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN
5	3	2	2.01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5	3	2	2.02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5	3	2	2.03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
5	3	2	2.04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani

Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
5	4	0	0	0	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN
5	4	2	2.01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	4	2	2.02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
5	4	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
5	4	2	2,03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 (T-C.33)

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi PD		80.8	Point	30.366.142.300	APBD		81.1	Point	30.665.158.000
						Indeks Manajemen Risiko PD		63.7	Persen				63.8	Persen	
5	3	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		100	Persen	39.000.000,00	APBD		100	Persen	39.000.000,00
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	4	Dokumen	8.000.000	APBD		4	Dokumen	8.000.000
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	3.000.000	APBD		2	Dokumen	3.000.000
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	3.000.000	APBD		2	Dokumen	3.000.000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	5.000.000	APBD		2	Dokumen	5.000.000
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	5.000.000	APBD		2	Dokumen	5.000.000
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	3.000.000	APBD		1	Laporan	3.000.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	7	Laporan	10.000.000	APBD		7	Laporan	10.000.000
5	3	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	1.000.000	APBD		1	Dokumen	1.000.000
5	3	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	70	Data	1.000.000	APBD		70	Data	1.000.000
5	3	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan		100	Persen	28.480.688.000	APBD		100	Persen	28.480.688.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	65	Orang/bulan	28.445.688.000	APBD		65	Orang/bulan	28.445.688.000
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	15.000.000	APBD		1	Laporan	15.000.000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	8	Laporan	20.000.000	APBD		8	Laporan	20.000.000
5	3	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis		100	Persen	5.000.000	APBD		100	Persen	90.470.000
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	5.000.000	APBD		1	Paket	5.000.000
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	0	Orang	0	APBD		70	Orang	85.470.000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	0	Orang	0	APBD		0	Orang	0
5	3	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100	Persen	361.789.900	APBD		100	Persen	450.000.000
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	15.000.000	APBD		1	Paket	15.000.000
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	2	Paket	65.602.500	APBD		2	Paket	120.000.000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	20.000.000	APBD		1	Paket	30.000.000
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	69.187.400	APBD		1	Paket	90.000.000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	3	Dokumen	11.000.000	APBD		3	Dokumen	10.000.000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Bandung	12	Laporan	15.000.000	APBD		12	Laporan	15.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	150	Laporan	166.000.000	APBD		75	Laporan	170.000.000
5	3	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah		100	Persen	47.761.800	APBD		100	Persen	85.000.000
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	8	Unit	47.761.800	APBD		4	Unit	85.000.000
5	3	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100	Persen	1.297.992.600	APBD		100	Persen	1.365.000.000
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Bandung	9000	Laporan	40.000.000	APBD		9000	Laporan	20.000.000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	34.202.460	APBD		12	Laporan	120.000.000
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	0	Laporan	0	APBD		0	Laporan	0
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	12	Laporan	1.223.790.140	APBD		12	Laporan	1.225.000.000
5	3	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik		95	Persen	133.910.000	APBD		95	Persen	155.000.000
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM Kab. Bandung	18	Unit	113.950.000	APBD		23	Unit	120.000.000
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM Kab. Bandung	26	Unit	19.960.000	APBD		27	Unit	20.000.000
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Bandung	0	Unit	0	APBD		1	Gedung	0
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Bandung	0	Unit	0	APBD		1	Unit	15.000.000
					Jumlah 1					30.366.142.300					30.665.158.000
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN		90	Persen	3.819.350.700	APBD		90	Persen	3.395.756.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
5	3	2	2.01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	Persen	1.426.510.500	APBD		100	Persen	1.470.750.000
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	35.000.000	APBD		1	Dokumen	35.000.000
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	48.750.000	APBD		1	Dokumen	48.750.000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	750.000.000	APBD		2	Dokumen	750.000.000
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	15.000.000	APBD		1	Laporan	15.000.000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Bandung	900	Dokumen	100.000.000	APBD		900	Dokumen	100.000.000
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	42.070.000	APBD		1	Dokumen	45.000.000
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM Kab. Bandung	2	Lembaga	150.000.000	APBD		2	Lembaga	150.000.000
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	260.160.000	APBD		1	Dokumen	300.000.000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	5000	Dokumen	15.270.000	APBD		5000	Dokumen	16.000.000
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	10.260.500	APBD		1	Laporan	11.000.000
5	3	2	2.02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi		90	Persen	677.834.200	APBD		90	Persen	690.000.000
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	40	Dokumen	137.834.200	APBD		40	Dokumen	150.000.000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1750	Dokumen	140.000.000	APBD		1750	Dokumen	140.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	400.000.000	APBD		2	Dokumen	400.000.000
5	3	2	2.03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN		100	Persen	1.225.000.000	APBD		100	Persen	675.000.000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM Kab. Bandung	400	Dokumen	700.000.000	APBD		100	Dokumen	200.000.000
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM Kab. Bandung	300	Orang	350.000.000	APBD		100	Orang	300.000.000
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Bandung	0	Dokumen	0	APBD		0	Dokumen	0
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	BKPSDM Kab. Bandung	2	Orang	100.000.000	APBD		2	Orang	100.000.000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKPSDM Kab. Bandung	8	Orang	75.000.000	APBD		8	Orang	75.000.000
5	3	2	2.04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik		95	Persen	490.006.000	APBD		95	Persen	560.006.000
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	61.730.000	APBD		1	Dokumen	61.730.000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	103.500.000	APBD		2	Dokumen	103.500.000
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	0	Laporan	0	APBD		0	Laporan	0
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM Kab. Bandung	3	Orang	141.000.000	APBD		6	Orang	211.000.000
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM Kab. Bandung	326	Orang	8.776.000	APBD		326	Orang	8.776.000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM Kab. Bandung	3	Orang	40.000.000	APBD		3	Orang	40.000.000
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	20	Laporan	80.000.000	APBD		20	Laporan	80.000.000
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM Kab. Bandung	40	Dokumen	40.000.000	APBD		40	Dokumen	40.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	15.000.000	APBD		1	Laporan	15.000.000
5	4	0	0	0	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.154.964.000	APBD				5.794.964.000
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN		85	Persen	5.154.964.000	APBD		88	Persen	5.794.964.000
5	4	2	2.01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi		3	Persen	820.000.000	APBD		3	Persen	1.320.000.000
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	35.000.000	APBD		1	Dokumen	35.000.000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM Kab. Bandung	765	Orang	750.000.000	APBD		1000	Orang	1.250.000.000
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	35.000.000	APBD		1	Dokumen	35.000.000
5	4	2	2.02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		3	Persen	4.334.964.000	APBD		3	Persen	4.474.964.000
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	5.000.000	APBD		1	Dokumen	5.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2026	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2027
					Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun									
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Bandung	100	Orang	100.000.000	APBD		100	Orang	100.000.000
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Bandung	434	Laporan	4.199.964.000	APBD		1000	Laporan	4.339.964.000
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	30.000.000	APBD		1	Dokumen	30.000.000
5	4	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		0	Persen	0			0	Persen	0
5	4	2	2,03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	BKPSDM Kab. Bandung	0	Orang	0	APBD		0	Orang	0
					Jumlah 2					8.974.314.700					9.190.720.000
					Jumlah Total					39.340.457.000					39.855.878.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANDUNG

IV.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA SKPD tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2026.

Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung serta strategi dan prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 sebesar Rp. 39.340.457.000 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Namun dana sebesar itu belum tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Jawa Barat. Ada kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang dipangkas dananya.

Tabel 4. 1 Rencana Kebutuhan Anggaran Belanja BKPSDM Tahun 2026

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Sakip Perangkat Daerah		82.25	Point	30.366.142.300,00	APBD	
						- Presentase Aset Dalam Kondisi Baik		95	Persen			
5	3	1	2.01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi		100	Persen	39.000.000,00	APBD	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	4	Dokumen	8.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	3.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	3.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	5.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	5.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	3.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	7	Laporan	10.000.000	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	1.000.000	APBD	
5	3	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	70	Data	1.000.000	APBD	
5	3	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan		100	Persen	28.480.688.000	APBD	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	65	Orang/bulan	28.445.688.000	APBD	
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	15.000.000	APBD	
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	8	Laporan	20.000.000	APBD	
5	3	1	2.05	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis		100	Persen	5.000.000	APBD	
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	5.000.000	APBD	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	0	Orang	0	APBD	
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPSDM Kab. Bandung	0	Orang	0	APBD	
5	3	1	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran		100	Persen	361.789.900	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	15.000.000	APBD	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	2	Paket	65.602.500	APBD	
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	20.000.000	APBD	
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Paket	69.187.400	APBD	
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	3	Dokumen	11.000.000	APBD	
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Bandung	12	Laporan	15.000.000	APBD	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Bandung	150	Laporan	166.000.000	APBD	
5	3	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah		100	Persen	47.761.800	APBD	
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	8	Unit	47.761.800	APBD	
5	3	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100	Persen	1.297.992.600	APBD	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Bandung	9000	Laporan	40.000.000	APBD	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	34.202.460	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	0	Laporan	0	APBD	
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Bandung	12	Laporan	1.223.790.140	APBD	
5	3	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik		95	Persen	133.910.000	APBD	
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM Kab. Bandung	18	Unit	113.950.000	APBD	
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BKPSDM Kab. Bandung	26	Unit	19.960.000	APBD	
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Bandung	0	Unit	0	APBD	
5	3	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Bandung	0	Unit	0	APBD	
					Jumlah 1					30.366.142.300		
5	3	2	0	0	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rata-rata Persentase Manajemen Layanan ASN		90	Persen	3.819.350.700	APBD	
5	3	2	2.01	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100	Persen	1.426.510.500	APBD	
5	3	2	2.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	35.000.000	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	48.750.000	APBD	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	750.000.000	APBD	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	15.000.000	APBD	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Bandung	900	Dokumen	100.000.000	APBD	
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	42.070.000	APBD	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM Kab. Bandung	2	Lembaga	150.000.000	APBD	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	260.160.000	APBD	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	5000	Dokumen	15.270.000	APBD	
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	10.260.500	APBD	
5	3	2	2.02	0	Mutasi dan Promosi ASN	Prosentase ASN Yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi		90	Persen	677.834.200	APBD	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM Kab. Bandung	40	Dokumen	137.834.200	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1750	Dokumen	140.000.000	APBD	
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	400.000.000	APBD	
5	3	2	2.03	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan ASN		100	Persen	1.225.000.000	APBD	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	BKPSDM Kab. Bandung	400	Dokumen	700.000.000	APBD	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM Kab. Bandung	300	Orang	350.000.000	APBD	
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Bandung	0	Dokumen	0	APBD	
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	BKPSDM Kab. Bandung	2	Orang	100.000.000	APBD	
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKPSDM Kab. Bandung	8	Orang	75.000.000	APBD	
5	3	2	2.04	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Yang Berkinerja Baik		95	Persen	490.006.000	APBD	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	61.730.000	APBD	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	2	Dokumen	103.500.000	APBD	
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Bandung	0	Laporan	0	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM Kab. Bandung	3	Orang	141.000.000	APBD	
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM Kab. Bandung	326	Orang	8.776.000	APBD	
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM Kab. Bandung	3	Orang	40.000.000	APBD	
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	20	Laporan	80.000.000	APBD	
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM Kab. Bandung	40	Dokumen	40.000.000	APBD	
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Bandung	1	Laporan	15.000.000	APBD	
5	4	0	0	0	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					5.154.964.000	APBD	
5	4	2	0	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN		85	Persen	5.154.964.000	APBD	
5	4	2	2.01	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Memenuhi Standar kompetensi		3	Persen	820.000.000	APBD	
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	35.000.000	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM Kab. Bandung	765	Orang	750.000.000	APBD	
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	35.000.000	APBD	
5	4	2	2.02	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		3	Persen	4.334.964.000	APBD	
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	5.000.000	APBD	
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	BKPSDM Kab. Bandung	100	Orang	100.000.000	APBD	

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Rancangan Akhir Tahun 2026					Sumber Dana	Catatan Penting
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Keg		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Bandung	434	Laporan	4.199.964.000	APBD	
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	BKPSDM Kab. Bandung	1	Dokumen	30.000.000	APBD	
5	4	2	2,03	0	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri		0.00%	Persen	0		
5	4	2	2,03	2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	BKPSDM Kab. Bandung	0	Orang	0	APBD	
					Jumlah 2					8.974.314.700		
					Jumlah Total					39.340.457.000		

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2026 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung dengan memperhatikan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2026 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program - program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung untuk 2026.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2026 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan.

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek strategis sebagai dasar penetapan arah kebijakan pembangunan sumber daya aparatur daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah pentingnya memastikan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen Renja dengan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD, serta Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2025–2029.

Proses penyusunan Renja dilakukan secara terencana dan sistematis dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program. Seluruh program dan kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan riil organisasi, didukung oleh indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi. Selain itu, penyusunan Renja juga memperhatikan dinamika regulasi serta isu-isu strategis dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diharapkan mampu memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM yang lebih terfokus dan adaptif.

V.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Bandung Tahun 2026 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja telah dievaluasi dari tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan harus mengedepankan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta ketepatan waktu dan sasaran. Proses pelaksanaan juga harus disertai dengan mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berkala, baik secara elektronik melalui sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) maupun secara manual apabila terjadi kendala teknis. Pelaporan hasil pelaksanaan Renja menjadi bagian integral dalam proses evaluasi dan merupakan

bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran berikutnya.

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bagian akhir dari siklus perencanaan tahunan, pelaksanaan Renja memerlukan tindak lanjut yang terstruktur dan berkelanjutan. Tindak lanjut ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Renja tidak hanya diukur dari capaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam melakukan evaluasi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan secara sistematis dan berorientasi ke depan.Rencana Tindak Lanjut dari pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2026 meliputi:

1. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan
   Melakukan evaluasi berkala atas capaian program dan kegiatan sebagai dasar perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyempurnaan Perencanaan Tahun Berikutnya
   Menggunakan hasil evaluasi sebagai masukan dalam menyusun Renja tahun 2027 dan menyesuaikan strategi sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan sumber daya aparatur.
3. Peningkatan Kapasitas SDM
   Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pelaksana perencanaan agar kualitas dokumen dan pelaksanaan Renja meningkat.

4. Digitalisasi Proses Perencanaan dan Pelaporan
Memperkuat penggunaan sistem informasi seperti SIPD untuk menyusun, mengawal, dan mengevaluasi Renja secara transparan, efisien, dan terintegrasi.

Soreang, 14 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ttd

TATANG KUSNAWAN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA